

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang**

Sektor ekonomi dapat dikatakan sebagai penunjang yang cukup signifikan bagi pertumbuhan maupun pembangunan di Indonesia. Yang menjadi sektor unggulan pertumbuhan ekonomi yang berada di Indonesia, yang berperan dalam keberlangsungan kehidupan masyarakat ialah dengan adanya pasar.<sup>1</sup> Pasar, dalam konteks ini, adalah arena di mana pedagang dan pembeli saling berjumpa untuk melakukan jual beli barang dan jasa secara langsung. Sebagai bagian terdepan masyarakat guna mencari pendapatan, pasar menjadi titik fokus di mana hampir semua kebutuhan barang dapat ditemukan. Lebih dari sekadar tempat jual-beli, pasar juga menjadi panggung pertemuan antara konsumen, produsen, distributor, dan semua pihak yang tergabung dalam dinamika yang melibatkan barang dan jasa.

Dapat dikatakan bahwa Pasar, sebagai satuan besar yang terorganisir, menjadi motor penggerak kegiatan ekonomi yang berjalan secara berkesinambungan. Interaksi antara penjual dan pembeli di dalamnya menciptakan transaksi yang memainkan peran kunci dalam menentukan tingkat kesejahteraan para pedagang. Sebagai sebuah sistem yang berjalan terus-menerus, pasar tidak hanya menjadi tempat bertemunya penawaran dan permintaan, tetapi juga pusat

---

<sup>1</sup> Agus Triono and HS Tisnanta, "Pasar Rakyat Vs. Pasar Modern Ketimpangan Pengaturan Produk Hukum Daerah," *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* 02, no. 01 (2022): 12–36, <https://doi.org/10.52738/pjk.v2i1.80>.

dinamika ekonomi yang memengaruhi kesejahteraan pelaku ekonomi di dalamnya.<sup>2</sup> Salah satu bentuk paling mendasar dari ekonomi kerakyatan adalah Pasar Rakyat, di mana kegiatan ekonomi ini didasarkan pada pemberdayaan masyarakat dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidup dan tercapainya kesejahteraan tanpa mengorbankan eksploitasi Sumber Daya Alam yang tersedia.<sup>3</sup>

Kehadiran Pasar Rakyat menjadi suatu kebutuhan mendasar bagi masyarakat, mengingat sebagian besar kegiatan perdagangan aktif di lingkungan ini. Jual beli di Pasar Rakyat melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjalankann sumber daya ekonomi yang mencakup sektor pertanian, peternakan, kerajinan, makanan, dan berbagai sektor lainnya. Pembangunan dan pengelolaan Pasar Rakyat sendiri merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, swasta, koperasi, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah..<sup>4</sup>

Adanya Pasar Rakyat memiliki potensi yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, karena pasar ini dapat menyediakan layanan bagi berbagai kalangan masyarakat, baik yang berasal dari golongan ekonomi menengah ke bawah maupun golongan ekonomi menengah ke atas.<sup>5</sup> Pasar Rakyat bukan hanya

---

<sup>2</sup> Nurlaila Fadjarwati et al., “Analisis Kinerja Aset Pasar Rakyat Kabupaten Bandung Berdasarkan SNI (Studi Kasus Pasar Rakyat Ciwidey),” *Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas* 5, no. 1 (2021): 61–70, <https://doi.org/10.12962/j26151847.v5i1.8734>.

<sup>3</sup> M Arifin, “revitalisasi pasar rakyat dalam upaya peningkatan sosial ekonomi pedagang dan eksistensi pasar di pasar mandalika kota mataram,” n.d.

<sup>4</sup> Vika Annisa Qurrata, Reta Giyanti Supratman, and Rizka Binti Khuzaimah, “Strategi Ketahanan Pasar Rakyat Di Masa Pandemi Covid-19,” *Inovasi* 18, no. 1 (2022): 105–11, <https://doi.org/10.30872/jinv.v18i1.10365>.

<sup>5</sup> Yulio Astria Yudha Firnanda and Lukman Arif, “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat Pada Pasar Sukodono Kabupaten Sidoarjo,” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 2 (2022): 1089, <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i2.2293>.

menjadi tempat utama bagi produk-produk berstandar ekonomi kerakyatan, melainkan juga merupakan wadah yang signifikan untuk berbagai aspek. Selain memiliki peran yang signifikan untuk penciptaan ruang kerja, pasar rakyat juga berpeluang besar bagi para petani sebagai produsen. Mereka dapat mempunyai penghasilan dari hasil pertanian mereka melalui penjualan produk langsung di Pasar Rakyat atau melalui perantara seperti pemasok atau agen.

Dengan begitu, pasar rakyat dapat menciptakan dampak positif yang signifikan terhadap semua orang yang terlibat, termasuk produsen, pedagang, pemasok, atau konsumen. Selain itu, pemerintah dalam perannya sebagai pengelola juga memperoleh manfaat dari pendapatan pajak yang kemudian dapat didistribusikan kepada masyarakat untuk kepentingan masyarakat secara luas.

Secara geografis, letak Provinsi Jambi sangat strategis yang termasuk dalam kawasan ASEAN dan lintas wilayah Sumatera (Sumatera Selatan, Riau, Bengkulu, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau) karena dapat menjadi pintu gerbang barang dan jasa, dari Batam, dari Singapura dan Malaysia, serta dari Provinsi lain.<sup>6</sup> Di Provinsi Jambi banyak sekali tersebar Pasar Rakyat di setiap daerahnya, salah satunya di daerah Kota Jambi. Kota Jambi memiliki jalur perdagangan melalui sungai Batanghari yang mana hingga saat ini sungai Batanghari masih menjadi akses jalur perdagangan. Walikota Kota Jambi juga memiliki Visi menjadikan Kota

---

<sup>6</sup> Pemprov Jambi, "Laporan Kinerja Provinsi Jambi Tahun 2016," *Jambiprov.Go.Id*, 2016, [https://jambiprov.go.id/files/LKj\\_PemprovJambi\\_2016.pdf](https://jambiprov.go.id/files/LKj_PemprovJambi_2016.pdf).

Jambi sebagai pusat perdagangan dan jasa berbasis masyarakat berakhlak dan berbudaya dengan mengedepankan pelayanan prima.<sup>7</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi di peroleh data sebagai berikut :

**Table 1.1 Pasar Rakyat di Kota Jambi**

| No. | Pasar Rakyat  | Alamat                                              | Jumlah potensi Pasar |       | Total unit | Luas pasar $m^2$ |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------|----------------------|-------|------------|------------------|
|     |               |                                                     | Kios                 | Lapak |            |                  |
| 1   | Talang Banjar | Jl. Rankayo Pingai, Talang Banjar, Jambi Timur      | 279                  | 652   | 931        | 11.778           |
| 2   | Aurduri       | Jl. Perumnas Aurduri, Penyengat rendah, Telanaipura | 33                   | 380   | 413        | -                |
| 3   | Kasang        | Jl. Setia Budi, Kasang, Jambi Timur                 | 39                   | 114   | 153        | 3.298            |
| 4   | Pasir Putih   | Jl. Rb. Siagian, Pasir Putih, Jambi Selatan         | 32                   | 100   | 132        | -                |
| 5   | Olak Kemang   | Jl. Kh. Hasan Anang, Olak Kemang, Danau Teluk       | 19                   | 40    | 59         | 890              |
| 6   | TAC           | Jl. DR. Soemantri Brojonegoro, Sipin, Danau Sipin   | 89                   | 54    | 143        | 6.047            |

Sumber : Dinas perindustrian dan perdagangan kota jambi 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah Pasar Rakyat yang dikelola pemerintah Kota Jambi berjumlah 6 Pasar yang tersebar di wilayah Kota Jambi.

<sup>7</sup> Dinas Pendidikan Kota Jambi, “Visi Dan Misi (2018-2023),” *Disdik.Jambikota.Go.Id*, 2021, <http://disdik.jambikota.go.id/halaman/detail/visi-dan-misi> .

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, Pemerintah Kota Jambi mendapatkan keleluasaan untuk merancang kebijakan-kebijakan yang berfokus pada kepentingan publik, termasuk Pembangunan infrastruktur seperti fasilitas dan pasar sebagai komponen utama pelayanan dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal.<sup>8</sup>

Guna Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pemerintah Kota Jambi pada tahun 2015 telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Penataan yang dimaksud adalah :

“Segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modern di suatu daerah agar tidak merugikan dan mematikan pasar rakyat, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang ada. Dengan tujuan untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan pasar rakyat, mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang telah ada serta dapat mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha perpasaran antara Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.”<sup>9</sup>

Pada Pasal 31 dan 33 PerDa tersebut menjelaskan bahwa :

“Walikota melimpahkan kewenangan Pembinaan dan Pengawasan kepada Kepala Satuan Kerja yang Bertanggung jawab dibidang Perdagangan yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Dalam rangka Pembinaan, menurut pasal tersebut walikota jambi melakukan : Pengembangan sistem manajemen pengelolaan Pasar Rakyat yang baik, Pemberian pelatihan dan konsultasi terhadap para pedagang binaan di Pasar Rakyat, Fasilitas kerja sama antara pedagang Pasar Rakyat dan pemasok, serta Pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana Pasar Rakyat.”<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> “Pemerintah Daerah,” Pub. L. No. 23 (2014).

<sup>9</sup> Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

<sup>10</sup> Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan pasal 31 dan 33.

Berdasarkan penjelasan pada peraturan daerah kota jambi tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap Penataan Pasar Rakyat serta melakukan Pembinaan dalam hal ini sarana dan prasarana kepada pedagang dan pelaku usaha. Pembinaan yang dilakukan berupa perbaikan atau revitalisasi bangunan pasar, pengenalan manajemen profesional, peningkatan kerja sama, dan pemberian pelatihan.

Namun faktanya, masih terdapat permasalahan yang harus dihadapi pada Pasar Rakyat, Seperti halnya dalam Penataan dan Pembinaan Pasar. Dampak dari kondisi tersebut adalah terjadinya ketidakteraturan, bau, dan kekumuhan, sehingga faktor kenyamanan bagi para pembeli menjadi terabaikan.<sup>11</sup> Seperti yang ada di kelurahan Talang Banjar, Jambi Timur, Kota Jambi, tepatnya Pasar Rakyat Talang Banjar. Pasar yang dikategorikan cukup luas dan dengan jumlah kios serta lapak yang banyak, pada saat ini fakta yang terjadi bahwa masih ada terjadi permasalahan di Pasar tersebut. sebagaimana dikutip dari Koran Elektronik Tribun jambi bahwa:

“Untuk berjualan ikan segar dibutuhkan pasokan air bersih agar ikan tetap hidup. Hal ini disampaikan oleh ibu Wati selaku pedagang ikan nila di pasar talang banjar. Tidak hanya itu, pedagang lain juga mengeluhkan terkait luas lorong jalan yang cukup kecil hanya bisa untuk satu orang jika pelanggan mau berhenti. Hal tersebut disampaikan oleh Afis pedagang daging di pasar tersebut.”<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Abd Rohman and Dewi Citra Larasati, “Revitalisasi Pasar Rakyat Sebagai Upaya Menjaga Eksistensi Pasar Tradisional,” *Anterior Jurnal* 22, no. 2 (2023): 69–75, <https://doi.org/10.33084/antterior.v22i2.4597>.

<sup>12</sup> Tribun Jambi, “Pedagang Pasar Talang Banjar Mengeluh Taka Da Air Bersih, Fasha Perintahkan Disperindag Inspeksi,” *Tribunnews.Com*, 2023, <https://jambi.tribunnews.com/2023/05/19/pedagang-pasar-talang-banjar-mengeluh-tak-ada-air-bersih-fasha-perintahkan-disperindag-inspeksi>.

Tidak hanya itu, berdasarkan hasil observasi, idealnya sebuah bangunan pasar itu terletak dipinggir jalan, bukan di dalam Lorong yang susah di jangkau oleh pembeli. Hal ini juga sesuai disampaikan salah satu pedagang Pasar Rakyat Talang Banjar :

“Pasar rakyat ini cocok letaknya di pinggir jalan, supaya pengunjung pasar lebih mudah untuk berbelanja tidak perlu jauh – jauh untuk ke dalam Lorong yang sering macet, apalagi jika menggunakan mobil cukup sulit untuk masuk. Ujar Toni”<sup>13</sup>

Ditambah juga masih terdapat pedagang yang berjualan di luar bangunan yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota Jambi. Hal tersebut menyebabkan timbulnya kemacetan yang mengganggu pengguna jalan lebih khusus pada pagi hari dan sore hari.

Berdasarkan Hasil Observasi dan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang terjadi pada Pasar Rakyat Talang Banjar Kota Jambi terkait dengan kurang strategisnya penataan penempatan pasar, Fasilitas masih kurang memadai dan kurangnya arahan serta pembinaan kepada pedagang mengenai penggunaan bangunan pasar yang telah disediakan.

Pemerintah Daerah, yakni Pemerintah Kota Jambi, Disperindag Kota Jambi, dan UPTD Pasar Talang Banjar, seharusnya memiliki keterlibatan yang aktif dalam menata dan membina Pasar Rakyat Talang Banjar. Sejak tahun 2015 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 15 tahun 2015 dikeluarkan oleh Pemerintah, dengan tujuan melakukan penataan dan pemberian pembinaan pada Pasar Rakyat, Hingga saat ini masih muncul permasalahan tersebut. Berdasarkan Latar Belakang masalah

---

<sup>13</sup> Observasi dan wawancara pada Tanggal 22 November 2023

di atas, maka Penulis mengambil Judul dalam Penelitian ini dengan Judul :  
 “Evaluasi Kebijakan Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat Talang Banjar Kota  
 Jambi (Studi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Banjar Kota Jambi)”

Penelitian ini merujuk pada Penelitian terdahulu yang dimana sebagai penunjang untuk menyelesaikan permasalahan yang diteliti. Seperti judul berikut ini :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Indah Noer Kholifah dengan Judul  
 “Manajemen Tata Kelola Pasar Rakyat (studi kasus pada Pasar Rakyat Kemukusan  
 Desa Ciberem Kecamatan Sumbang)” Melalui penilaian dan pengujian, poin  
 mendasarnya adalah memberikan saran perbaikan bagi penyelenggaraan Pasar  
 Kekukusan Kota Ciberem. Hal ini dilakukan untuk memahami penatausahaan pasar  
 rakyat yang dilakukan oleh unit pelaksana khusus Pasar Umum Kemukusan Kota  
 Ciberem.

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif. Sumber informasi yang  
 digunakan mencakup informasi penting dan opsional, dan strategi pengumpulan  
 informasi meliputi metode wawancara, dokumentasi, dan observasi. Proses  
 pemeriksaan informasi dilakukan melalui reduksi data, penyajian informasi, dan  
 pengambilan keputusan. Hasilnya menunjukkan bahwa Unit Pelaksana Teknis  
 melakukan kewajibannya sesuai aturan teritorial. Namun dari sisi pengelolaan,  
 pendekatan yang digunakan disesuaikan dengan kondisi setempat. Tantangannya  
 muncul karena pedagang terkadang sulit memahami instruksi dan arahan, sehingga  
 pelaksana teknis atau pengelola pasar kesulitan dalam menertibkan tata letak barang



dagangan dan menjaga kebersihan lingkungan pasar. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan para pedagang yang cenderung membuang sampah sembarangan.<sup>14</sup>

Penelitian ini, yang dilakukan oleh peneliti, fokus pada evaluasi serta menganalisis kebijakan penataan dan pembinaan pasar rakyat berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 15 tahun 2015. Objek penelitian terletak di Pasar Rakyat Talang Banjar Kota Jambi. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Indah Noer Kholifah menilai, menganalisis, dan memberikan rekomendasi perbaikan terhadap manajemen Pasar Kemukusan di Desa Ciberem. Fokus penelitian tersebut adalah untuk memahami manajemen pengelolaan pasar rakyat yang dilakukan oleh Unit Pelaksanaan Teknis Pasar Rakyat Kemukusan, Desa Ciberem. Dengan demikian, perbedaan utama terletak pada subjek penelitian, objek penelitian, dan fokus penelitian yang berbeda.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Miya Audina dengan Judul “Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Perumnas Aurduri 1 Dalam Mewujudkan Pasar Tradisional Modern Di Kota Jambi” Tujuan yang mendasari kajian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan langkah revitalisasi pasar tradisional di pasar tradisional Perumnas Aulduri 1 kota Jambi dan mengetahui efektivitas pelaksanaannya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan informasi melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. informasi yang

---

<sup>14</sup> Indah Noer Kholifah, “Manajemen Tata Kelola Pasar Rakyat (Studi Kasus Pada Pasar Rakyat Kemukusan Desa Ciberem Kecamatan Sumbang)” (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020).

terkumpul dianalisis secara kualitatif dan digambarkan secara deskriptif. Penelitian ini memperlihatkan upaya peremajaan di Pasar Perumnas Aurduri 1 telah dilakukan dengan baik, meskipun belum mencapai tingkat ideal. Ditemukan bahwa Enam indikator yang mempengaruhi keberhasilan upaya pengaktifan pasar tradisional belum sepenuhnya diatasi. Keterbatasan anggaran merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi kurang optimalnya pencapaian tujuan. Efektivitas pelaksanaan revitalisasi ini juga dinilai belum optimal, terlihat dari kurangnya dampak positif dan signifikan terhadap sebagian pedagang.<sup>15</sup>

Yang membedakan peneliti dan yang diteliti oleh Miya Audina terletak pada fokus penelitian, objek penelitian, dan tujuan penelitian. Penelitian ini, yang dilakukan oleh peneliti, fokus pada evaluasi kebijakan penataan dan pembinaan pasar rakyat talang banjar Kota Jambi. Objek penelitian berada di Pasar Rakyat Talang Banjar Kota Jambi. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Miya Audina membahas penerapan kebijakan peremajaan pasar tradisional di Pasar Perumnas Aurduri 1 dengan tujuan menciptakan pasar tradisional yang lebih modern di Kota Jambi. Dengan demikian, perbedaan utama antara kedua penelitian ini terletak pada konteks kebijakan yang dievaluasi dan objek penelitian yang menjadi fokus analisis.

---

<sup>15</sup> Miya Audina, "Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Perumnas Aurduri 1 Dalam Mewujudkan Pasar Tradisional Modern Di Kota Jambi" (Universitas Jambi, 2021).

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Rian Yuda Muharam dengan Judul “Analisis Pengelolaan Pasar Rakyat Kota Teluk Kuantan” tujuan studi ini yakni guna memahami pengelolaan pasar di Kota Teluk Kuantan. teknik yang digunakan ialah deskriptif kualitatif. Untuk menganalisis penelitian kualitatif, terdapat beberapa tahap yang meliputi penyederhanaan informasi , penggambaran informasi, dan verifikasi. Studi ini menunjukkan masih kurangnya kesiapan dan kehati-hatian pemerintah dalam pemindahan lokasi pedagang dan perlindungan fasilitas pasar rakyat menyebabkan permasalahan seperti tidak tersedianya tempat pedagang yang pindah, terutama karena sebagian besar merupakan pedagang basah. Selain itu, beberapa kios kosong karena pedagang lebih memilih berjualan di luar pasar. Dalam mengelola kebersihan terlambat, dan kurangnya pemeliharaan di area Pasar Rakyat Kota Teluk Kuantan mengalami kurangnya perawatan. akibat permasalahan tersebut, penyelenggaraan pasar tidak berjalan secara optimal.<sup>16</sup>

Yang membedakan peneliti dengan studi yang dilakukan oleh Rian Yuda Muharam terletak pada fokus penelitian, objek penelitian, dan kebijakan yang dievaluasi. Penelitian ini, yang dilakukan oleh peneliti, mengevaluasi kebijakan terkait penataan dan pembinaan Pasar Rakyat Kota Jambi, dengan merujuk pada Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 15 Tahun 2015. Objek penelitian terletak di Pasar Rakyat Talang Banjar Kota Jambi. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Rian Yuda Muharam terkait dengan pengelolaan pasar rakyat di Kota Teluk Kuantan. Fokus penelitian tersebut adalah pada aspek pengelolaan pasar rakyat

---

<sup>16</sup> Rian Yudha Muharam, “Analisis Pengelolaan Pasar Rakyat Kota Teluk Kuantan” (Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).

dengan objek penelitian di Pasar Rakyat Kota Teluk Kuantan. Dengan demikian, perbedaan utama antara kedua penelitian ini terletak pada konteks kebijakan yang dievaluasi, objek penelitian, dan aspek manajemen pasar rakyat yang menjadi fokus analisis.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan informasi yang di dapatkan di atas, maka penulis menyusun formulasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat Talang Banjar Kota Jambi menurut peraturan daerah Kota Jambi Nomor 15 tahun 2015 ?
2. Bagaimana Evaluasi Kebijakan Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat Talang Banjar Kota Jambi menurut peraturan daerah Kota Jambi Nomor 15 tahun 2015 ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan pada penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dan Menganalisis Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat Talang Banjar Kota Jambi Menurut Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 15 Tahun 2015
2. Mengetahui dan Menganalisis Evaluasi dari Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat Talang Banjar kota Jambi Menurut Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 15 Tahun 2015

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis : Penelitian ini diharapkan dapat menambah Ilmu Pengetahuan khususnya mengenai Evaluasi Kebijakan Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat.
2. Manfaat Praktis :
  1. Sebagai Saran maupun masukan bagi Pemerintah Daerah Kota Jambi dalam Evaluasi Kebijakan Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat.
  2. Sebagai bahan Rujukan dan Kajian dalam Penelitian di bidang yang sama untuk penelitian selanjutnya.

## **1.5 Landasan Teori**

### **1.5.1 Kebijakan Publik**

Kebijakan Publik sebagai sebuah Pedoman kegiatan yang diharapkan mampu mencapai hasil yang diinginkan, yakni memecahkan suatu masalah yang berada di Kalangan Masyarakat dengan kekuasaan yang dimiliki. Dapat diartikan bahwa Kebijakan Publik adalah Serangkaian Keputusan serta tujuan tetap yang digambarkan dengan suatu pilihan yang diharapkan menghasilkan suatu Tindakan maupun keputusan untuk melakukan sesuatu hal yang bertujuan dengan Kepentingan Rakyat yang diambil oleh Pemegang Kekuasaan yakni Pemerintah.

Bridgeman dan Davis (2004) menyebutkan Kebijakan Publik sedikitnya mempunyai Tiga Dimensi yang saling bertautan, yakni sebagai Tujuan, pilihan tindakan yang Legal atau sah secara Hukum dan Hipotesis.<sup>17</sup>

1. Kebijakan Publik Sebagai Tujuan. Kebijakan Publik dianggap sebagai alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Banyak orang terlibat dalam proses pengambilan keputusan publik, yang melibatkan analisis, implementasi, evaluasi, dan rekomendasi (reevaluasi). Menetapkan tujuan menjadi suatu proses yang tak kalah penting, karena hanya melalui tujuan, arah dan dasar keputusan publik dapat terdefinisi dengan jelas.
2. Kebijakan Publik sebagai pilihan tindakan yang Legal. Keputusan ini dianggap sah dan berwibawa karena dihasilkan oleh lembaga yang sah dalam sistem pemerintahan. Beberapa indikator yang dapat menilai keberwibawaan tersebut meliputi kesesuaian dengan konstitusi dan hukum, kepatuhan terhadap peraturan, serta aspek keadilan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).
3. Kebijakan Publik sebagai Hipotesis. Kebijakan disusun berdasarkan teori, model, atau hipotesis tentang sebab dan dampak. Kebijakan selalu berlandaskan pada persepsi, dan untuk mencapai kesuksesan, perlu memediasi perkiraan kemajuan yang diharapkan dengan mekanisme pencegahan kegagalan yang mungkin belum teridentifikasi. Memahami

---

<sup>17</sup> Ph.D. Intan Fitri Meutia, *Analisis Kebijakan Publik* (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2013).

kebijakan sebagai hipotesis mengharuskan kalkulasi ekonomi dan sosial yang mendalam, melibatkan peran konsultan dan pembuat keputusan dalam menyusun kebijakan.

Menurut William Dunn, Kebijakan Publik sebagai suatu peraturan yang mengandung nilai dan standar, memiliki kekuasaan untuk mendukung kegiatan pemerintah dalam lingkup yuridisnya. Kebijakan publik hadir sebagai respons terhadap persoalan publik yang dianggap memerlukan suatu tindakan.<sup>18</sup>

#### **a. Evaluasi Kebijakan**

Evaluasi Kebijakan ini biasanya dipergunakan sebagai Wadah Penilaian jalannya sebuah Kebijakan Publik yang dimana untuk dapat dipertanggungjawabkan dan telah Tercapai atau tidak Tujuan yang diharapkan. Istilah Evaluasi menurut Thomas Dye, menyebutkan bahwa Evaluasi kebijakan merupakan pemeriksaan yang objektif, sistematis, dan empiris terhadap efek dari kebijakan dan program publik terhadap targetnya dari segi tujuan yang ingin dicapai.<sup>19</sup>

Menurut William N. Dunn, Pada umumnya istilah Evaluasi dapat di setarakan dengan Penaksiran (*Appraisal*), Pemberian Angka (*Rating*)

---

<sup>18</sup> Rizkie, "Kebijakan Public Sebuah Konsep," *Blogspot.Com*, 2015, <https://rizkie-library.blogspot.com/2015/12/kebijakan-publik-sebuah-konsep.html>.

<sup>19</sup> Wayyane Parsons, *Public Policy : Pengantar Teori & Praktik Analisis Kebijakan* (Jakarta: Kencana, 2005).

dan Penilaian (*Assessment*), Kata-kata yang menyatakan Usaha untuk Menganalisis Hasil Kebijakan dalam arti satuan Nilainya”.<sup>20</sup>

Menurut Winarto (2014) Evaluasi Kebijakan adalah metode perkiraan dan penilaian terhadap isi, implementasi, dan hasil kebijakan. Dalam hal ini, evaluasi kebijakan dilihat sebagai kegiatan yang berguna. Artinya evaluasi kebijakan dilakukan sepanjang proses kebijakan, bukan pada tahap akhir saja.<sup>21</sup>

Menurut Dunn (2003), Kriteria Evaluasi, yakni Efektifitas Kebijakan, Efisiensi dalam Pelaksanaan Kebijakan, Kecukupan terhadap Kebutuhan; Perataan Dalam Pelaksanaan Kebijakan; Responsivitas; Ketepatan Program.<sup>22</sup>

1. Efektifitas, Keefektifan (Efektifitas) berkenaan dengan Alternatif mencapai Hasil yang diharapkan (Dampak) atau Apakah Tujuan Pelaksanaan Inisiatif Tercapai. Adapun beberapa Indikatornya, yaitu Pencapaian Tujuan, Perubahan Dampak.

---

<sup>20</sup> Murwat Surtyani Raymundus I Wayan Ray, “Evaluasi Kebijakan Publik Dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Di Kelurahan Mekar Jaya Depok,” *IJPA - The Indonesian Journal of Public Administration Volume 6* (2020): 27–45.

<sup>21</sup> Ririn Yulianti Yulianti, “Evaluasi Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (Tpp) Dalam Meningkatkan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kota Banjar,” *Jurnal Pemerintahan Dan Politik 7*, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.36982/jpg.v7i2.2109>.

<sup>22</sup> Agustinus Lejiu, Masjaya, and Bambang Irawan, “Evaluasi Kebijakan Pembangunan Transmigrasi Di Kabupaten Mahakam Ulu (Studi Pada Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu),” *Jurnal Administrative Reform 2*, no. 4 (2014): 515–26.



2. Efisiensi, yaitu berkaitan Jumlah Usaha yang dibutuhkan Agar memperoleh tingkat Efektivitas tertentu. yang terakhir biasanya diukur dalam bentuk Biaya Moneter. Efisiensi biasanya ditentukan dengan menghitung Harga Satuan Produk atau Layanan. Indikatornya, tenaga kerja, waktu, jumlah usaha.
3. Kecukupan, Kecukupan lebih lanjut terkait dengan Efisiensi, Mengukur atau Memperkirakan seberapa baik Alternatif yang ada agar dapat memenuhi Kebutuhan, Nilai, atau Peluang untuk memecahkan Masalah yang muncul. Adapun beberapa Indikatornya, yaitu tingkat Akses dan Ketersediaan dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar.
4. Perataan, yang berkaitan erat dengan rasionalitas Hukum dan Sosial dan mengacu pada Distribusi Pengaruh dan Usaha antara Kelompok Sosial yang berbeda. mengetahui biaya dan manfaatnya tersebar merata.
5. Responsivitas, berkenaan dengan seberapa jauh Suatu Kebijakan dapat memuaskan Kebutuhan, Preferensi, atau Nilai Kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Beberapa Indikatornya, yaitu Tingkat Partisipasi dan Monitoring.
6. Ketepatan, Kriteria untuk memilih beberapa Alternatif sebagai Rekomendasi, saat Mengevaluasi apakah hasil dari Alternatif yang diajukan layak untuk dicapai. Beberapa Indikatornya, yaitu Pencapaian Tujuan, Kepuasan Pengguna.

### 1.5.2 Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat

Menurut Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 15 tahun 2015, penataan ialah :

“Segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan pendirian pasar modern di suatu daerah, agar tidak merugikan dan mematikan pasar rakyat, usaha mikro kecil menengah, dan koperasi yang ada.”<sup>23</sup>

Dapat dikatakan bahwa Penataan dilakukan langsung oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Jambi guna mengatur dan menata keberadaan pendirian pasar rakyat agar tetap dapat bersaing dengan pasar modern di daerah kota jambi.

Pada pasal 31 ayat 2 Perda Kota Jambi tersebut menyebutkan bahwa :

“Walikota melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan di wilayah kerjanya kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Perdagangan.”<sup>24</sup>

Dalam rangka Pembinaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 31, dilakukannya :<sup>25</sup>

- 1) peningkatan sistem manajemen pengelolaan Pasar Rakyat yang baik
- 2) memberikan pelatihan dan konsultasi kepada para pedagang binaan di Pasar Rakyat
- 3) Fasilitasi kerja sama antara pedagang Pasar Rakyat dan pemasok
- 4) Pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana Pasar Rakyat

---

<sup>23</sup> Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

<sup>24</sup> Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan pasal 31 ayat 2

<sup>25</sup> Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan pasal 33

Dalam peraturan daerah Kota Jambi nomor 15 tahun 2015 pada bagian pertama Pasar Rakyat pasal 6, Pasar Rakyat dikelola dan dapat dijalankan oleh Pemerintah Daerah, Koperasi, Swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota, baik secara mandiri maupun dengan melakukan kolaborasi dalam upaya memberdayakan pengelolaan Pasar guna meningkatkan daya saing.

Ruang lingkup pengaturan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko swalayan menurut Perda Kota Jambi no. 15 Tahun 2015 pasal 4 adalah Menata dan Membina Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko swalayan.<sup>26</sup>

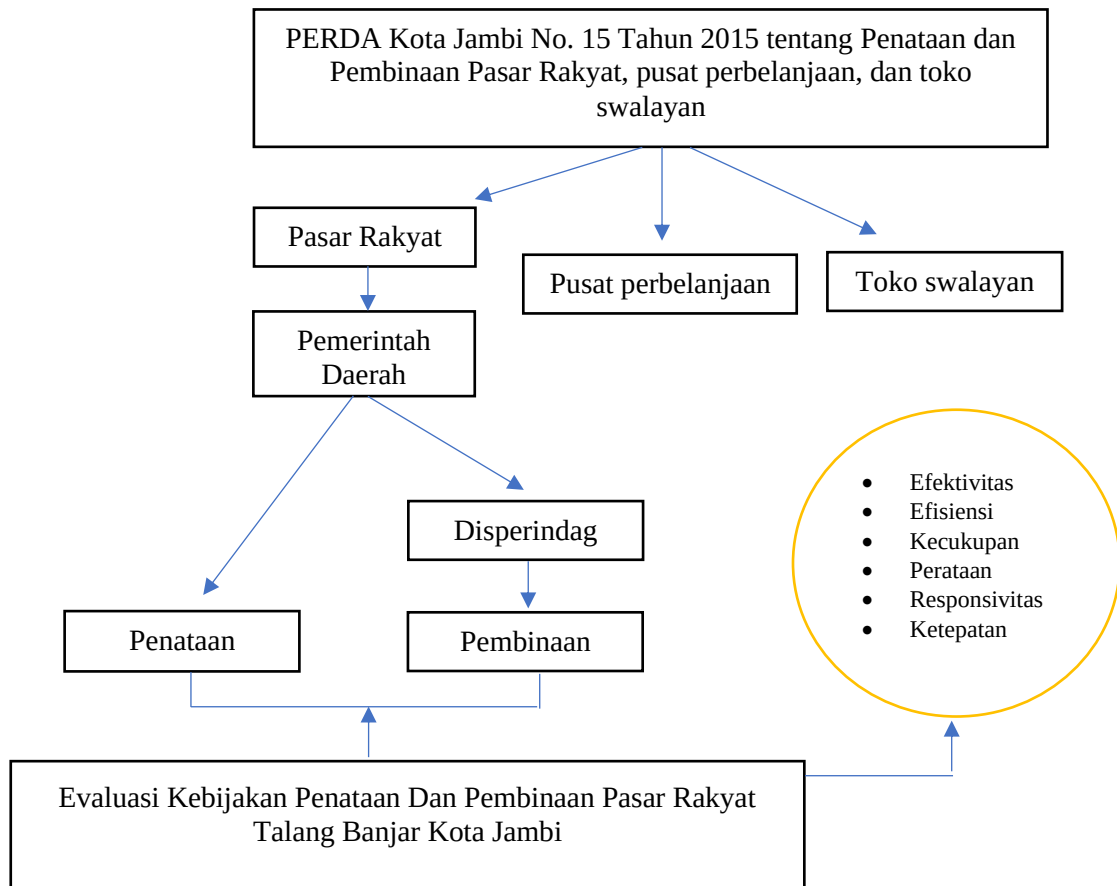
## **1.6 Kerangka Berpikir**

Sugiyono (2017) menyatakan bahwa kerangka berpikir adalah suatu rangkaian yang menunjukkan hubungan antara variabel yang menjadi fokus penelitian. Hal ini merupakan panduan dalam menyelesaikan masalah penelitian dan mengembangkan hipotesis penelitian, yang umumnya disajikan dalam bentuk diagram alur yang diperjelas dengan penjelasan kualitatif. Berikut adalah kerangka berpikir penelitian Evaluasi Kebijakan Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat Talang Banjar Kota Jambi.

---

<sup>26</sup> Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 15 tahun 2015 tentang Penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan pasal 4

**Gambar 1.1**  
**Kerangka Berpikir**



### 1.7 Metode Penelitian

Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian secara umum merupakan suatu cara ilmiah untuk mendapatkan informasi dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman penelitian tersebut. Pendekatan Deskriptif dengan metode Kualitatif dipilih untuk menggali pemahaman mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Dalam konteks ini, pelaksanaan penelitian diutamakan

pada ciri-ciri keilmuan, yang mencakup rasional, empiris, dan sistematis. Rasionalitas dalam pelaksanaan penelitian menekankan bahwa penelitian dilakukan dengan cara yang masuk akal, yang dapat dicapai melalui penalaran manusia.<sup>27</sup>

### **1.7.1 Jenis Penelitian**

Metode yang diterapkan peneliti yakni Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif memiliki tujuan untuk merinci permasalahan berbasis data dengan membandingkan, menghubungkan, menyajikan, menganalisis, dan menafsirkan informasi. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam terhadap fenomena yang sedang diselidiki melalui deskripsi yang detail dan analisis kontekstual.<sup>28</sup>

### **1.7.2 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Kota Jambi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi dan Satuan Kerja yang mengelola pasar rakyat di kota jambi. Peneliti juga melakukan Observasi dan Wawancara dengan pedagang di Pasar Rakyat Talang Banjar Kota Jambi.

---

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017).

<sup>28</sup> Achmadi dan Narbuko, *Metode Penelitian* (jakarta: Bumi Aksara, 2004).

### 1.7.3 Fokus Penelitian

Dalam rangka membatasi ruang lingkup penelitian, dalam konteks ini adalah mengevaluasi penataan dan pembinaan pasar rakyat di Kota Jambi, dengan merujuk pada Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 15 Tahun 2015. Dengan menetapkan fokus ini, diharapkan penelitian dapat lebih terarah dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman terkait Kebijakan Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat Talang Banjar Kota Jambi.

### 1.7.4 Sumber Data

Data yang didapatkan melalui 2 sumber, yakni Data Primer dan Data Sekunder.

1. Data primer adalah sumber data yang didapat secara langsung dari responden atau objek yang menjadi fokus penelitian, yang memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul data.<sup>29</sup>

Data primer dalam konteks penelitian ini adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber di lokasi penelitian. Data utama yang akan dikumpulkan berkaitan dengan kebijakan penataan dan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi.

---

<sup>29</sup> Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020).

2. Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh dari lembaga atau instansi tertentu, bukan dari sumber langsung di lapangan atau objek penelitian.<sup>30</sup> Dapat dikatakan bahwa jenis data ini adalah jenis data yang didapatkan dari berbagai sumber sebagai penunjang data primer, yang dianggap memiliki kaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Hal ini juga dapat berasal dari berbagai dokumen, Dokumen-dokumen ini menjadi referensi yang memperkuat atau melengkapi data primer yang diperoleh langsung dari lapangan.

#### **1.7.5 Teknik Penentuan Informan**

Penentuan ini ditentukan dengan Purposive Random Sampling. Purposive Random Sampling ialah Teknik pengambilan sampel sebagai Sumber Data berdasarkan pertimbangan tertentu oleh peneliti karena sesuai bidangnya.

1. Kepala Bidang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi yaitu Bapak Budi Setiawan, SE, ME
2. Kepala Bidang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi yaitu Bapak Zamzami, SE
3. Koordinator Lapangan Satuan Kerja Pasar Rakyat Talang Banjar
4. Pedagang di Pasar Rakyat Talang Banjar Kota Jambi, yaitu Bapak Jhon pedagang Ikan, Ibu Asni pedagang bumbu, dan bang Abim pedagang tempe tahu.

---

<sup>30</sup> Bagong Suyanto dan Sutinah, Loc. Cit.

### **1.7.6 Teknik Pengumpulan Data**

Sesuai dengan kebutuhan dalam Metode Penelitian ini, antara lain :

#### **1. Wawancara**

Wawancara ialah percakapan antara dua orang dengan tujuan bertukar informasi melalui dialog, dengan tujuan membentuk pemahaman mendalam terhadap suatu topik khusus. Cara ini digunakan untuk mengungkapkan informasi melalui pemeriksaan langsung terhadap pertanyaan yang telah disiapkan dan meminta pendapat kepada informan.

#### **2. Observasi**

Observasi ialah suatu proses saat peneliti untuk menyelidiki situasi penelitian. Yang diperoleh dari hasil observasi adalah partisipan, lokasi, peristiwa, kegiatan, serta waktu. Pengamatan ini dilakukan di Pasar Rakyat Talang Banjar Kota Jambi.

#### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan rekaman suatu peristiwa. Dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar, maupun karya lainnya. Salah satu pelengkap penggunaan metode wawancara dan observasi dalam penelitian kualitatif ialah dengan adanya dokumen.

### **1.7.7 Teknik Analisis Data**

Menurut Noeng Muhadjir (1998), Analisis data mengacu pada pengambilan dan pengelolaan wawancara, observasi, dan catatan lain



secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman terhadap kasus yang sedang diteliti.<sup>31</sup>

1. Reduksi data, yakni proses pemilihan, perangkuman dan penyederhanaan pokok-pokok yang sesuai masalah penelitian guna mendapatkan deskripsi yang terperinci dan mendukung kemudahan bagi peneliti dalam mengumpulkan data.
2. Penyajian data, ialah proses pemaparan informasi penelitian yang diperoleh. Dengan memaparkan data yang diperoleh, maka mempermudah peneliti untuk mengetahui yang telah terjadi.
3. Penarikan kesimpulan, merupakan proses analisis yang menggambarkan inti sari dari keputusan yang diperoleh dan sesuai dengan fokus penelitian.

#### **1.7.8 Triangulasi**

Triangulasi ialah suatu metode pemeriksaan keakuratan data penelitian dengan menggunakan berbagai metode. Ada empat jenis triangulasi, yakni :

1. Triangulasi data, yaitu merupakan pendekatan menggunakan berbagai sumber data yang berbeda dalam suatu penelitian.
2. Triangulasi peneliti, yaitu melibatkan penggunaan beberapa peneliti dengan latar belakang disiplin ilmu yang berbeda dalam satu penelitian.

---

<sup>31</sup> Ahmad Rijali Uin and Antasari Banjarmasin, “Analisis Data Kualitatif,” vol. 17, 2018.

3. Triangulasi teori, yaitu penggunaan beberapa perspektif atau pendekatan dalam menginterpretasi satu set data.
4. Triangulasi Teknik Metodologis, yaitu melibatkan penggunaan beberapa sudut pandang dalam menafsirkan satu set data dalam sebuah penelitian.

Peneliti menggunakan tipe triangulasi data. Dalam pengumpulan data, peneliti juga mengecek data dengan cara memverifikasi pengumpulan data dan berbagai sumber data.